

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP ALOKASI APBD TERHADAP PEMULIHAN UMKM DKI JAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19

¹Nana Nurwaesari; ²Raden S. Bayu Mangkurat

¹Universitas Nasional Jakarta, ²Universitas Jenderal Soedirman

email : ¹nananurwaesari11@gmail.com

*Paper Accepted: 30 September 2022
Paper Reviewed: 3-13 Oktober 2022
Paper Edited: 14-22 Oktober 2022
Paper Approved: 25 Oktober 2022*

ABSTRAK

UMKM menjadi sektor yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat DKI Jakarta. Penelitian lapangan yang dilakukan penulis menunjukkan sekitar 90 persen pelaku usaha ultra-mikro mendominasi Jakarta. Terbukti pada Krisis Moneter 1998, UMKM hadir menjadi pahlawan perekonomian masyarakat dan pada Krisis Global 2008, UMKM tidak berdampak. Sayangnya, kondisi ini sangat berbeda saat pandemi COVID-19 hadir di mana kondisi UMKM Jakarta menjadi 'pincang'. Studi literatur dan data lapangan menunjukkan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk UMKM di DKI Jakarta tidak seberapa tinggi seperti dua sektor utama lain yakni, sektor Pendidikan dan Kesehatan. Padahal, selama ini UMKM selalu digadangkan menjadi sektor penting penyelamat perekonomian rakyat terutama, kelas menengah ke bawah, terutama saat krisis ekonomi melanda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap alokasi APBD UMKM DKI Jakarta pada 2019 hingga 2021, di mana penulis akan membandingkan dan menganalisis alokasi APBD tersebut dari satu tahun sebelum pandemi, saat pandemi hadir, dan tahun berikutnya. Dari hasil penelitian didapat 3 (tiga) temuan. Pertama, pandemi COVID-19 memberi dampak buruk terhadap pelaku UMKM Jakarta. Minimal sekitar 70 persen omzet pelaku UMKM Jakarta menurun. Kedua, dampak pandemi terhadap pelaku UMKM melibatkan dinamika ekonomi-politik APBD di mana hal ini juga melibatkan peran para aktor Eksekutif dan Legislatif Pemprov DKI Jakarta, yang mana ditemukan perbedaan signifikan antara alokasi APBD UMKM Jakarta pada 2019, 2020, dan 2021. Ketiga, KSBB UMKM sebagai salah satu program bantuan untuk pemulihan UMKM selama pandemi masih belum merata dan efektif secara keseluruhan. Pada bagian akhir, peneliti menyertakan rekomendasi kebijakan publik untuk mempercepat pemulihan dan pengembangan UMKM di DKI Jakarta.

Kata Kunci : UMKM; APBD DKI Jakarta; Ekonomi Politik; Kebijakan Publik; Pandemi COVID-19

PENDAHULUAN

Peran UMKM sejak dulu memang tidak bisa diragukan lagi. Pada Krisis Moneter yang terjadi di Indonesia akibat Asian Financial Crisis pada 1998, sektor UMKM masih bisa bertahan dengan baik. Padahal, pada saat itu ada banyak perusahaan atau usaha berskala besar yang mengalami kebangkrutan karena harga bahan baku impor yang melambung tinggi, sehingga banyak produksi terhenti (Putra, 2018). Berlanjut ke kondisi Krisis Global 2008, kondisi UMKM masih terbilang stabil, bahkan tidak berdampak dengan krisis yang ada. Hal ini dikarenakan sektor UMKM memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi (Hindarsyah, 2008: 143). Inilah mengapa UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia (PPN/Bappenas, 2020).

Namun, ketika pandemi COVID-19 hadir di Indonesia, pandemi berdampak besar bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, tak terkecuali di DKI Jakarta. Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan keterbatasan mobilitas sehingga penjualan, permodalan hingga omzet menurun drastis (Rosita, 2020). Pembatasan aktivitas ini menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat signifikan secara nasional. Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) menyatakan bahwa kondisi UMKM saat pandemi COVID-19 lebih parah dari krisis keuangan 2008 (Sugiri, 2020).

Pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020 menyebabkan penurunan kontribusi UMKM terhadap PDB cukup besar yaitu sebanyak 37,3% (Nadyan, Selvia, and Fauzan, 2021). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membantu pemulihan UMKM Jakarta seperti, relaksasi pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) hingga terbentuknya program bantuan berupa platform bernama Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk UMKM (Nurwaesari, Bambang Hirawan, and Komara Ragamustari, 2022). Pandemi COVID-19 menjadi pukulan besar

bagi Pemprov DKI Jakarta karena pelaku UMKM sebagai penyelamat perekonomian rakyat benar-benar terdampak.

Akan tetapi, penulis kemudian menemukan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta pada satu tahun sebelum pandemi (2019), saat pandemi hadir (2020), dan setahun setelah pandemi hadir (2021) memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Selain itu, program bantuan KSBB UMKM yang dibentuk dan diimplementasikan sejak Mei 2020 juga perlu dianalisis lebih lanjut keefektifitasannya. Selain itu, rekomendasi kebijakan publik lain juga diperlukan, bukan hanya sebagai pemulihan UMKM Jakarta di masa pandemi, namun di era post-pandemi.

Penelitian ini ingin menjawab beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kondisi sektor UMKM di Jakarta sejak hadirnya pandemi COVID-19?
2. Apakah alokasi APBD UMKM di DKI Jakarta (2019-2021) sudah terbilang cukup untuk memenuhi pemulihan dan pengembangan UMKM?
3. Apakah bantuan program pemulihan UMKM di Jakarta sudah terbilang efektif dan merata?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi teks dan in-depth interview. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus alokasi APBD untuk UMKM DKI Jakarta pada 2019 hingga 2021, di mana ketiga tahun tersebut adalah setahun sebelum pandemi, saat pandemi hadir, dan setahun sejak pandemi hadir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi teks dan *in-depth interview* dengan 4 pelaku UMKM di *preliminary* wawancara, 5 aktor Eksekutif, dan 4 aktor Legislatif Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Forum Group Discussions (FGD) juga dilakukan oleh penulis kepada 31 pelaku UMKM sebagai penerima bantuan program

Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB UMKM). Selanjutnya, penelitian ini dianalisis lebih lanjut oleh penulis melalui teori Ekonomi Politik Neo-Klasik oleh Grindle (1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama pandemi COVID-19 hadir, banyak data menjelaskan tentang bagaimana UMKM berdampak secara nasional. Akan tetapi, belum ada yang menjelaskan secara spesifik seberapa jauh kerugian omzet yang dirasakan oleh para pelaku UMKM di Jakarta. Pada wawancara mendalam yang dilakukan penulis kepada IHS selaku salah satu pejabat Pemprov DKI Jakarta (Eksekutif) menyatakan bahwa 90 persen lebih pedagang kategori ultra-mikro ada di Jakarta, dan 70 persen di antaranya adalah penjual di sektor makanan dan minuman (Wawancara mendalam dengan IHS, 27 Mei 2021). Selanjutnya, penulis melakukan preliminary sebagai tahap awal wawancara mendalam dengan 4 (empat) pelaku UMKM di daerah Jakarta Pusat untuk mengetahui sejauh mana pandemi COVID-19 berdampak pada omzet penjualan mereka.

Tabel 1.1 Wawancara Pendahuluan dengan Pelaku UMKM Non-Loksem dan Loksem

Nama	Jenis Dagangan	Dampak Omzet (Persentase)
Wawan	Nasi Ayam Geprek	80%
Irnawati	Aneka Minuman	95%
Zumiati	Aneka Lauk	75%
Andi	Rujak/Buah	90%

Sumber: Wawancara pendahuluan oleh penulis pada 18-25 November 2020

Dari data tabel di atas, dapat ditarik poin penting bahwa dampak penurunan omzet yang dirasakan para pelaku UMKM Jakarta minimal di angka 70 persen. Bahkan, salah satu responden mengalami kerugian sebesar 96 persen. Hal ini terjadi karena DKI Jakarta

menjadi pusat kota yang banyak didatangi oleh para pekerja dari kota-kota satelit di sekitarnya yakni, Bodetabek. Ketika kebijakan PSBB diberlakukan di Jakarta sejak 10 April 2020 (Kumala, 2020), maka banyak pekerja yang melakukan *Work From Home* (WFH), sehingga, sektor makanan dan minuman di DKI Jakarta banyak mengalami penurunan penjualan (Triana et al., 2021).

Akan tetapi, penulis berargumen bahwa pengembangan UMKM di Jakarta perlu berangkat dari alokasi APBD yang dinilai cukup dan terus bertambah seiring bertambahnya kebutuhan pengembangan UMKM. Terlebih lagi, UMKM sering digadang-gadang sebagai sektor ekonomi penyelamat perekonomian masyarakat, terutama di masa krisis ekonomi (Lili Marlinah, 2020). Oleh karena itu, penulis mencoba membandingkan dan menganalisis anggaran serta realisasi alokasi anggaran UMKM Jakarta dari tahun 2019, 2020, dan 2021.

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Alokasi UMKM di DKI Jakarta, 2019-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	198 miliar	154 miliar
2020	89 miliar	85 miliar
2021	222 miliar	34 miliar

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Merujuk dari data alokasi APBD UMKM DKI Jakarta di atas, kita dapat melihat bagaimana alokasi APBD UMKM pada 2019 tidak terlalu besar seperti tahun 2021 saat pandemi COVID-19 sudah melanda dan berdampak pada pelaku UMKM Jakarta. Alokasi UMKM pada 2020, di awal tahun pandemi COVID-19 tidak sampai sebesar 100 miliar. Hal ini dapat diwajarkan karena perekonomian di berbagai daerah serta provinsi di Indonesia menghadapi '*shock*' dalam kondisi ekonomi dan kesehatan. Selain itu, IHS dalam wawancara mendalam dengan penulis

menyatakan bahwa sebagian besar alokasi APBD saat pandemi diprioritaskan untuk sektor kesehatan dalam menangani penyebaran pandemi COVID-19 (Wawancara mendalam dengan IHS, 27 Mei 2021).

Sementara itu, alokasi APBD UMKM pada 2021 sangat tinggi yakni, mencapai 200 miliar lebih. Perbandingan alokasi UMKM pada 2019 dan 2021 sangatlah berbeda. Terlihat bagaimana alokasi APBD menjadi semakin meningkat ketika krisis ekonomi dan kesehatan karena pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap para pelaku UMKM. Namun, realisasi pada APBD UMKM 2021 justru sangat minim yakni, hanya 34 miliar rupiah. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Sejauh mana program bantuan pemulihan UMKM selama pandemi COVID-19 telah berjalan dengan efektif.

Selain itu, merujuk dari data alokasi APBD UMKM di atas, penulis kemudian melakukan wawancara mendalam secara lanjut dengan salah satu aktor Legislatif yakni, anggota DPRD DKI Jakarta berinisial SAN (Wawancara mendalam dengan SAN, 15 Juni 2021), alokasi APBD untuk UMKM memang terbatas tidak sebesar untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan. Akan tetapi, dari tahun ke tahun jumlahnya selalu meningkat walau tidak sebesar dua sektor lainnya. Inilah mengapa diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak seperti, swasta dan masyarakat secara luas untuk saling mendukung program-program pengembangan UMKM di Jakarta.

Kolaborasi yang disampaikan oleh SAN memiliki relevansi yang kuat terhadap prinsip Kota Jakarta sebagai Kota Kolaborasi. Kolaborasi yang didukung oleh pihak swasta dalam mendukung pengembangan UMKM juga telah dilakukan pada provinsi lain di Indonesia seperti, Yogyakarta (Pertiwi and Darumurti, 2021). Salah satu bentuk program bantuan pemulihan UMKM hasil kolaborasi di DKI Jakarta adalah Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB UMKM). Program bantuan ini terdiri dari tiga jenis bantuan yakni, pelatihan online, pinjaman modal 0 persen, dan pemberian sarana dan prasarana untuk para pelaku UMKM Jakarta.

Sayangnya, 80 persen dari 31 responden pelaku UMKM yang diwawancarai oleh

penulis melalui FGD menyatakan bahwa mereka tidak tahu menahu tentang adanya bantuan pinjaman modal 0 persen, sedangkan bantuan pelatihan online sebanyak 100 persen diketahui oleh semua responden. Sementara itu, dalam FGD tersebut, para pelaku UMKM menyampaikan bahwa bantuan pinjaman modal 0 persen adalah bantuan yang paling mereka butuhkan. Meskipun pelatihan online yang diberikan atas hasil kerjasama dengan beberapa pihak swasta seperti, Tokopedia, Shopee, Buka Lapak, dan lain sebagainya sangat bermanfaat bagi mereka, namun bantuan pinjaman modal 0 persen menjadi jenis bantuan yang paling dibutuhkan.

Tidak hanya itu, penulis melihat bahwa program ini belum berjalan secara efektif sepenuhnya, karena untuk proses monitoring dan evaluasinya belum melibatkan para penggiat UMKM di Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan juga peningkatan dan rekomendasi kebijakan publik lain terhadap dukungan program pengembangan UMKM di Jakarta, terutama yang bermula dari pengalokasian APBD UMKM.

Walaupun belum berjalan sepenuhnya efektif, namun menurut INK sebagai salah satu anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) periode 2017-2022, kolaborasi yang terjalin antara pihak Pemprov DKI Jakarta, swasta dan masyarakat secara luas sudah terjalin cukup baik (Wawancara mendalam dengan INK, 11 Oktober 2021).

Jika dianalisis dengan menggunakan Perspektif Ekonomi Politik Neoklasik, di mana menurut Grindle (1989), teori ini terbagi lagi menjadi dua yakni, *State-Centred* dan *Society-Centred Approach*. Secara singkat, Grindle mengungkapkan bahwa *State-Centred Approach* berpusat pada negara dan *Society-Centred Approach* berbasis pada konsep masyarakat (Grindle, 1989).

Hadirnya kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat secara luas dalam membantu pemulihan dan pengembangan UMKM ini awalnya cenderung lebih merujuk pada *Society-Centred Approach*. Hal ini dikarenakan Pada teori Grindle (1989) mengatakan bahwa dalam pendekatan *State-Centred Approach Political Economy*, birokrat sebagai individu tidak

hanya memaksimalkan kepentingan ekonomi-politik dirinya sendiri, namun juga memaksimalkan kesejahteraan dan kekuatan untuk menguntungkan desa asal mereka atau kelompok etnis yang menjadi bagian mereka (Grindle, 1989). Terlebih lagi, mayoritas aktor dalam penelitian ini merujuk pada aktor-aktor pemerintah, sedangkan pelaku UMKM adalah objek dari penelitian ini.

Akan tetapi, jika teori Grindle Ekonomi-Politik Neo Klasik Grindle (1989) dianalisis pada kolaborasi pengembangan UMKM yang terjadi pada Kota Jakarta ini, maka pendekatannya sudah tidak dapat dipisah lagi antara *State-Centred Approach* atau *Society-Centred Approach*. Akan tetapi, kedua pendekatan itu perlu digabung menjadi *State-Society Centred Approach Political Economy*. Alasannya, karena pemulihan dan pengembangan UMKM di Jakarta bukan lagi hanya tugas dan upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta saja, namun juga pihak-pihak lain termasuk masyarakat.

KESIMPULAN

Dikarenakan peran penting yang dimiliki oleh UMKM terhadap perekonomian di Indonesia, tak terkecuali di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, maka pemulihan terhadap UMKM saat terdampak pandemi COVID-19 harus segera dilakukan. Namun, pemulihan ini tidak dapat dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sendirian. Perlu banyak pihak seperti pihak swasta dan masyarakat untuk saling berkolaborasi membantu pemulihan UMKM. Akhirnya pada Mei 2020, dibentuklah program bantuan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) salah satunya UMKM yang terdiri atas tiga jenis bantuan utama yakni, bantuan pinjaman modal 0 persen, pelatihan online, dan pemberian sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas bisnis para pelaku UMKM.

Turunnya omzet penjualan UMKM secara drastis sejak hadirnya pandemi, minimnya alokasi APBD UMKM DKI Jakarta hingga belum tercapainya efektivitas program bantuan UMKM secara menyeluruh, membuat posisi UMKM berada di posisi yang sangat rentan apabila pemerintah tidak bertindak lebih cepat dan tepat untuk pemulihan dan pengembangan UMKM selanjutnya pada pasca pandemi.

Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan publik yang bisa diambil sebagai langkah penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk pemulihan dan pengembangan UMKM ke depannya. *Pertama*, legislatif perlu menetapkan nominal minimal terkait alokasi APBD UMKM setiap tahunnya, sehingga jika ke depannya ada krisis, nominal tersebut tidak bisa diturunkan karena menjadi nominal yang 'ajeg' untuk pengembangan UMKM, minimalnya 10-15 persen setiap tahun.

Kedua, proses birokrasi harus dipercepat atau 'dipotong' agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM dapat segera terpenuhi melalui Dana APBD. *Ketiga*, untuk menghemat APBD, Pemprov DKI Jakarta perlu menjalin kerja sama dan kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan dengan pihak swasta, *startups*, *e-commerce* hingga komunitas. Selain itu, perlu ada pemaksimalan kolaborasi dari 6 (enam) Dinas di bawah naungan DPPKUKM dalam mendorong pengembangan UMKM Jakarta seperti, Disparekraf, DPMPSTP, Disnakertrans, dan sebagainya. Dengan demikian, alokasi APBD untuk pengembangan UMKM tidak terfokus pada DPPKUKM saja.

Keempat, melalui alokasi APBD, Pemprov DKI Jakarta perlu membangun tempat-tempat khusus bagi pelaku UMKM terutama di lokasi yang strategis dan ramai untuk mereka membuka usaha. Misalnya, membuka gerai-gerai khusus di dekat Stasiun Kereta, Bandara, Terminal, dan lain sebagainya. Langkah ini sebagai salah satu solusi agar alokasi APBD yang digunakan untuk pengembangan UMKM benar-benar bisa membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan omzet dan memperluas marketing mereka.

Kelima, alokasi APBD perlu menjadi sumber utama pendanaan pemulihan dan pengembangan UMKM di Jakarta, agar peran APBD tidak terenggut. Meskipun peredaran CSR di Jakarta cukup banyak, namun penumbuhan sektor ekonomi mikro yang penting seperti UMKM sudah sewajarnya menjadi perhatian bagi para Legislatif yang menyusun APBD (Priyanto, 2019). Terakhir, penulis merekomendasikan agar proses kolaborasi yang terjadi antara Pemprov DKI Jakarta, pihak swasta, dan

masyarakat dikuatkan dengan kebijakan dan regulasi yang jelas dan tepat. Hal ini agar praktik *rent-seeking* tidak terbuka dengan lebar karena adanya kolaborasi tanpa batas yang terjadi pada setiap pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prijanto, *Mengintip APBD dan Pembangunan Jakarta*, Jakarta: Timpani Publishing, 2019.

Artikel Jurnal

Grindle, Merilee S. 1989. “| Policy, Planning, and The World Bank The New Political Economy Positive Economics and Negative Politics.”

Hindarsyah, Ida. 2008. “Dampak-Krisis-Global-Terhadap-UKM-Oleh-Ida-Hindarsyah-Vol-2-No-1-Tahun-2008.Pdf.”

Kumala, Ratna Desinta Mega. 2020. “Legal Analysis of Government Policy on Large Scale Social Restrictions in Handling COVID-19.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2(2): 181–200.

Lili Marlinah. 2020. “Peluang Dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19.” *Jurnal Ekonomi* 22(2): 118–24.

Nadyan, Arfid Fathun, Elsa Selvia, and Shidqy Fauzan. 2021. “The Survival Strategies of Micro, Small and Medium Enterprises in The New Normal Era.” *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 12(2): 142–49. https://bit.ly/dinamika_ekonomi.

Nurwaesari, Nana, Fajar Bambang Hirawan, and Safendri Komara Ragamustari. 2022. “The Impact of Collaborative Governance on Msmes Recovery in Dki Jakarta During the Covid-19 Pandemic.” *Distribusi - Journal of Management and Business* 10(1): 1–10.

Pertiwi, Adella Intan, and Awang Darumurti. 2021. “Collaborative Governance in Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises Through Sibakul Jogja Free-Ongkir During Covid-19.” *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 5(1): 49–65.

PPN/Bappenas, Kementrian. 2020. “Kajian Kebijakan Penanggulangan.” : 1–56.

Putra, Adnan Husada. 2018. “Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 5(2).

Rosita, Rahmi. 2020. “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia.” *Jurnal Lentera Bisnis* 9(2): 109.

Sugiri, Dani. 2020. “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19.” *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi* 19(1): 76–86.

Triana, Meilinda et al. 2021. “Kebijakan Pemerintah Dki Jakarta Menangani Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14(1): 1–9.